

**KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN MAPPI**

Eusebius Papuanus Tawa

NPP: 30.1469

*Asdaf Kabupaten Mappi, Provinsi Papua
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: puatawa05@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Development activities can be right on target and well implemented and yield beneficial results if the development can meet the needs of the community. In fact, the results of village development planning have so far been deemed unable to meet the needs of the community because during the implementation of the Development Planning Meeting (MUSREMBANG) the community should be present and participate in the implementation of the Development Planning Meeting (MUSREMBANG) to convey aspirations and opinions as well as ideas. Purpose: This study aims to analyze and determine the performance of the Village Community Empowerment Service to increase community participation in the development of Mappi District. Method: In this study, the researcher used a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The researcher used the theory from Sinambela (2012) and analyzed the performance of DPMK using the following dimensions: (1) productivity dimension (2) responsiveness dimension (3) responsibility dimension (4) accountability dimension. Result: The results of this study indicate that the performance of DPMK has declined in recent years. Specifically in relation to increasing community participation, DPMK's performance did not go well due to a lack of budget and supporting resources. The obstacles experienced by the community themselves, such as lack of information regarding the implementation of village development planning and not being supported by an understanding of the importance of participation in village development planning. Conclusion: The conclusion of this study is the performance of the village community empowerment service to increase community participation in village development planning in Mappi District by using four indicators namely; productivity, responsiveness, responsibility and accountability in general have not been maximized. This shows that the village community empowerment service in Mappi District needs to innovate in relation to the utilization of resources, both suggestions and infrastructure as well as limited official human resources so that they are efficient and support the productivity of the office.*

Keywords: *Performance, Participation, Village Development Planning*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Kegiatan pembangunan bisa tepat sasaran dan terlaksana dengan baik serta bermanfaat hasilnya apabila pembangunan tersebut bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan*

masyarakat. Pada kenyataannya, hasil dari perencanaan penyusunan pembangunan kampung selama ini dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) masyarakat seharusnya hadir dan turut serta dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat serta buah pikiran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Mappi. **Metode:** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori dari Sinambela (2012) dan menganalisis kinerja DPMK menggunakan dimensi yaitu: (1) Dimensi produktivitas (2) dimensi responsivitas (3) dimensi tanggungjawab (4) dimensi akuntabilitas. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir, kinerja DPMK menurun. Khusus dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat, kinerja DPMK tidak berjalan dengan baik lantaran kekurangan anggaran dan sumberdaya pendukung. Adapun kendala yang dialami masyarakat sendiri seperti kurangnya informasi akan pelaksanaan perencanaan pembangunan kampung serta tidak didukung dengan pemahaman akan pentingnya keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan kampung. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian ini adalah kinerja dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung di Kabupaten Mappi dengan menggunakan empat indikator yaitu ; produktivitas, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas secara umum belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa dinas pemberdayaan masyarakat kampung Kabupaten Mappi perlu melakukan inovasi dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya baik saran dan prasarana serta SDM dinas yang terbatas agar berdaya guna dan mendukung produktivitas dinas.

Kata kunci: kinerja, partisipasi, perencanaan pembangunan kampung

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia saat ini sudah berubah, dari masa orde baru yang bersifat sentralistik otoriter menjadi desentralistik demokratis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan kinerja aktif masyarakat., serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menimbang bagian b).”

Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan. Salah satu kegiatan Pemerintah Daerah dalam Kabupaten/Kota yaitu mengikutsertakan masyarakat pada tahap awal kegiatan pembangunan yaitu pada tahap perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan wajib dan harus dilakukan oleh setiap negara, khususnya untuk negara berkembang yang diarahkan untuk menciptakan suatu masyarakat yang sejahtera dan adil. Pembangunan harus dilakukan secara merata dan adil di seluruh wilayah, serta tidak hanya dikhususkan pada suatu kelompok masyarakat atau wilayah tertentu saja namun harus merata kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 261 Ayat 1). Otonomi daerah yang telah diberikan kepada daerah melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Demikian halnya dalam pembangunan, daerah diminta untuk mampu melakukan pembangunan secara komprehensif mulai dari perencanaan pembangunan di tingkat Desa hingga Kabupaten/Kota. Kegiatan pembangunan bisa tepat sasaran dan terlaksana dengan baik serta bermanfaat hasilnya apabila pembangunan tersebut bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga menjadi suatu kewajiban masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sendiri pada dasarnya harus berdasar pada permasalahan yang ada pada masyarakat. Untuk itu pembangunan yang dilakukan harus menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan, termasuk dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan karena masyarakat adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan persoalan aktual yang terjadi di lapangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada kenyataannya, hasil dari perencanaan penyusunan pembangunan kampung selama ini dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) masyarakat seharusnya hadir dan turut serta dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat serta buah pikiran. Namun masyarakat tidak turut partisipasi untuk menghadiri kegiatan tersebut sehingga kegiatan MUSREMBANG Akibatnya terlambat dilaksanakannya MUSREMBANG di tingkat Kabupaten yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal tahun 2022, namun baru dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 (musrebang kabupaten Mappi, diakses dari <https://papuaselatanpos.com/2022/07/19/buka-musrenbang-pj-bupati-mappi-usulan-program-program-harus-disesuaikan-dengan-keuangan-dan-kebutuhan-daerah/?amp>) pada tanggal 06 September 2022 pukul 22:20 WIB.

Hal ini kemudian menjadi perhatian Pj Bupati Mappi waktu itu menjadi perhatian pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) tahun anggaran 2023 Pj Bupati Mappi menegaskan agar MUSREMBANG ini bisa menjadi forum tertinggi, dalam proses penjangkauan aspirasi atas kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah ini, karena melihat banyak mengalami penurunan dari segi minat dan dianggap sebagai kegiatan formalitas (<https://papuaselatanpos.com/2022/07/19/buka-musrenbang-pj-bupati-mappi-usulan-program-program-harus-disesuaikan-dengan-keuangan-dan-kebutuhan-daerah/>)

Faktor lain yang mempengaruhi masyarakat tidak partisipasi dalam perencanaan penyusunan pembangunan ialah selama ini masyarakat seringkali diabaikan oleh pemerintah karena terbatasnya kemampuan masyarakat dalam penyusunan program yang sesuai dengan skala prioritas yang menyebabkan usulan program yang dibuat oleh masyarakat belum disusun baik dan belum terperinci. Akibatnya perencanaan tersebut disisihkan dari dokumen perencanaan akhir. Hal ini yang kemudian menyebabkan kekecewaan di masyarakat karena masyarakat merasa kebutuhan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah yang berdampak pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kampung.

1.3. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan perbandingan untuk penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Ripai, mahasiswa di universitas Hasanudin dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontamatene Kabupaten Kepulauan Selayar” pada tahun 2013 di mana metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori partisipasi masyarakat, dengan dimensi pemikiran atau ide-ide; uang dan pendanaan; material atau barang; fiksi atau tenaga. Permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan tidak semua masyarakat di Kecamatan Bontamatene ikut berpartisipasi dengan banyak alasan.
2. Penelitian Hendra Mondong dengan Judul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dengan dimensinya ; pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi barang. Hasil dari penelitian ini peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mampu, sesuai dengan informasi yang ada.
3. Skripsi yang ditulis Muhtardin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tahun 2021”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti, partisipasi masyarakat, konsep pemerintah desa dalam pembangunan desa dan musyawarah pembangunan desa.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus utamanya yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa serta dalam mencari fokus permasalahan yaitu faktor penghambat dalam pembangunan. Selain itu, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan salah satu teori yang digunakan yaitu teori partisipasi. Perbedaannya terletak pada tempat magang atau pengambilan data yaitu pemerintahan desa dan peneliti melakukan penelitian di dinas terkait.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Mappi.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori dari Sinambela (2012) dan menganalisis kinerja DPMK menggunakan dimensi yaitu: (1) Dimensi produktivitas (2) dimensi responsivitas (3) dimensi responsibilitas (4) dimensi akuntabilitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kabupaten Mappi

Penelitian yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terkait kinerja DPMK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung di Kabupaten Mappi, peneliti menggunakan lingkup kinerja dari teori (Sinambela, 2012) yang menyatakan dimensi-dimensi yang menjadi tolak ukur indikator kinerja, yaitu: (1) Produktivitas; (2) Responsivitas; (3) Responsibilitas; (4) Akuntabilitas.

1. Produktivitas

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Ibu Marice Raymu, S.H pada Rabu, 18 Januari di ruangannya menyatakan bahwa:

“Ruang kantor yang kecil, keterbatasan sarana kursi maupun meja, sehingga produktivitas DPMK terhambat. Dengan jumlah pegawai yang banyak serta SDM yang belum memiliki kualifikasi keterampilan maupun keahlian serta fasilitas yang tidak memadai akhirnya pegawai sebatas datang dan pergi, sebatas ada di kantor dan tidak melakukan apa - apa sehingga target capaian dinas tidak tercapai”

Fasilitas kerja yang disediakan oleh kantor pemerintahan merupakan sarana dan prasarana untuk memudahkan pekerjaan. Fasilitas kerja yang memadai dengan kondisi yang layak pakai dan terpelihara dengan baik akan membantu kelancaran proses kerja dalam suatu organisasi. Pemberian fasilitas yang lengkap juga dijadikan sebagai salah satu faktor pendorong untuk bekerja. Fasilitas kerja harus menjadi perhatian bagi setiap organisasi karena dapat mempengaruhi produktivitas dalam sebuah organisasi.

Fasilitas kerja pada prinsipnya menitikberatkan pada pekerjaan kantor atau perusahaan, yaitu membantu melayani berbagai kegiatan atau kelancaran kerja.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi ruang kantor yang digunakan hanya cukup untuk menampung enam sampai lima meja dengan tiap meja terdiri dari dua kursi. Kemudian komputer yang digunakan juga hanya terdiri dari satu komputer tiap ruangan padahal komputer sangat penting untuk mendukung kinerja pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Mappi.

Gambar Ruang Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi



Sumber: data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kampung Katan Bapak Obaldus Bapaimu di rumah beliau berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung dalam hal ini kegiatan musrembang. Dalam wawancara tersebut, Bapak Kepala Kampung Katan menyatakan:

“Pelaksanaan musrembang kampung di Kampung Katan sendiri berlangsung setiap tahun. Khusus untuk kampung katan sendiri pelaksanaan MUSREMBANG diikuti oleh BAMUSKAM. kemudian hasil MUSREMBANG tersebut kemudian disampaikan kepada kepala kampung untuk selanjutnya diserahkan kepada pendamping kampung dan dilanjutkan ke DPMK. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, masyarakat sendiri seringkali tidak mengetahui jadwal dan teknis pelaksanaan, dan juga tidak ada koordinasi dari dinas perihal waktu dan tempat dan juga masyarakat tidak hadir dengan alasan tidak ada uang ojek dan tidak diberi tahu”.

Selanjutnya dalam rangka pembangunan kampung, salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan kampung adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Berikut adalah hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bapak Yudas Thadeus Letsoin, S.IP :

“Produktivitas kampung dapat dilihat dari bagaimana kampung sendiri bisa mengelola sumberdaya yang ada di kampung dengan maksimal. BUMDES sendiri memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kampung. namun dari 162 kampung yang ada, baru ada lima BUMDES di lima kampung yang ada. Itupun kampung-kampung yang berada di sekitaran Distrik Obaa yang berada dekat dengan pusat kabupaten. Selain dari itu belum berjalan karena akses yang susah, jauh dari kabupaten dan keterbatasan fasilitas”

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Ibu Marice Raymu.S.H pada Rabu 18 Januari 2023 di ruangnya menyatakan bahwa:

“DPMK belum melaksanakan monitoring dan evaluasi selama 3 tahun terakhir dikarenakan tidak tersedia anggaran untuk kami melaksanakan monev sehingga kami mengetahui persoalan masyarakat hanya pada saat kepala kampung datang ke kantor untuk koordinasi tapi untuk dinas turun ke masyarakat belum dilakukan”.

2.Responsivitas

Hasil wawancara dengan masyarakat Ibu Erna Raymu sebagai salah satu yang pernah merasakan pelayanan Monitoring dan Evaluasi dari DPMK di setiap Kampung menyatakan:

“Pegawai yang turun untuk monev mereka baik dan ramah apalagi yang selama turun ke kita itu masih juga kita kenal jadi kalo mereka monev ke kampung kita bisa kasih tau apa sajayang jadi kendala karena sudah biasa sama mereka”

Berkaitan dengan indikator petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat dalam wawancara dengan Ibu Era beliau menjelaskan bahwa

“Kalau kita ke kantor Dinas pegawai kerja cepat, langsung memberikan informasi ke kita contoh kemarin saya datang untuk bertanya terkait alokasi dana desa langsung saya diarahkan ke bagian dana desa tanpa harus tunggu lama lagi di sana”

Selanjutnya hasil wawancara terkait indikator petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat dalam wawancara dengan Ibu Erabeliau mejelaskan bahwa:

“Sudah tepat pelayanan yang mereka berikan kayak tadi yang saya bilang saya mau bertanya tentang dana desa jadi langsung dikasih tahu bagian yang pas untuk memberikan saya informasi terkait dana desa”

Kemudian terkait indikator petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Ely Raymu:

“Biasanyakan petugas ada turun ke kampung – kampung buat monev nah di sana mereka cermat kalau memberikan informasi jadi kalau kami ada kendala setelah kami sampaikan mereka mampu juga memberikan solusi kepada kami”

3.Responsibilitas

Dalam hal pembangunan memerlukan suatu kejelasan tanggung jawab dan wewenang dan memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), untuk itu dalam menyusun perencanaan dalam suatu proyek diperlukan adanya suatu tujuan yang jelas sehingga bisa dikatakan tanggung jawab yang sebenarnya dan untuk kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu rangkaian atau asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan seperti halnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki faktor yang sangat penting yang tidak bisa lepas dari suatu organisasi yang merupakan penggerak, perencana untuk mencapai tujuan dalam organisasi.

Selanjutnya terkait dengan kualifikasi pendidikan pegawai. Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, diantaranya kesehatan dan kemampuan, faktor kemampuan sebagai salah satu faktor penentu kualitas SDM dapat dikembangkan melalui pendidikan. Kualifikasi pendidikan sangat diperlukan di dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai, pendidikan yang mendukung dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan suatu tugas sehingga tercapainya tujuan organisasi. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dapat memberikan kesempatan seseorang untuk meningkatkan keterampilan yang dia miliki. Selain itu dengan adanya kualifikasi pendidikan dapat mempermudah seseorang dalam mencapai suatu karir. Untuk menjabat suatu jabatan.

Berikut adalah tabel pegawai DPMK berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Data Pegawai DPMK berdasarkan pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	20
3.	DIPLOMA	-
4.	SLTA	20
5.	SLTP	4
Total		45

Sumber: RENSTRA DPMK 2023-2026

Wawancara dengan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bapak Yudas Thadeus Letsoin, S.IP Pada Kamis, 19 Januari 2022, menerangkan bahwa :

“Berkaitan dengan kompetensi pegawai, kompetensi aparatur dalam dinas, dengan adanya Covid-19 dan persoalan lain kinerja dinas berkurang. Kemudian ada upaya peningkatan dengan melakukan diklat pim 2 pim 3 kemudian koordinasi, pelatihan per bidang di DPMK sedang dilakukan sosialisasi SISPEDES DI BIDANG DANA DES, manajemen laporan dengan OPD , di bidang pemberdayaan ada pelatihan desa

presisi, penyelenggaran pemerintahan kampung, ada sosialisasi dan bimtek persiapan pemilihan kepala kampung untuk aparatur sedang ada pelatihan untuk penyelenggaraan pemilihan tingkat kampung, baru direncanakan di dalam renstra 2023-2026, bagian sekretariat menekankan disiplin melakukan finger print untuk setiap pegawai”.

4. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arvanita Kamagaimu, Kepala Bidang Pembangunan Desa beliau menyatakan bahwa:

“Sejauh ini tidak ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Semua pegawai baik pegawai negeri maupun pegawai kontrak patuh terhadap hukum”

Selanjutnya dalam wawancara terkait indikator akuntabilitas proses beliau menyatakan bahwa:

“DPMK mengacu pada peraturan perundang-undangan dan perda yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan dalam pelayanan administrasi maupun sistem informasi yang dipakai” Akuntabilitas program dan kebijakan dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Marice Raymu, S.H beliau menyatakan:

“Monitoring dan evaluasi adalah salah satu program yang kami lakukan untuk dapat mengetahui kendala apa saja dalam pembangunan kampung pada masyarakat dan program ini sudah berjalan dengan baik sampai akhirnya harus tertunda pada tiga tahun terakhir karena anggaran yang terbatas dari pemerintah daerah. Kemudian untuk pertanggungjawab kami selalu membuat LKPJ yang di dalamnya sudah memuat pelaksanaan kegiatan evausia dan hasil dari pelaksanaan kegiatan”.

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung

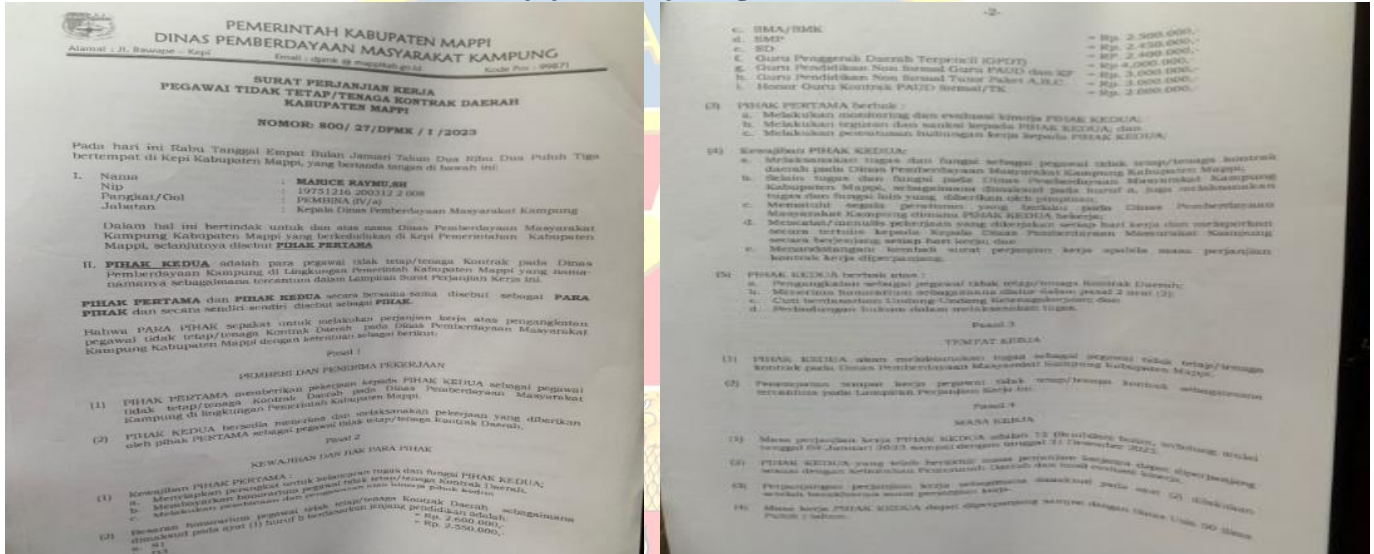
1. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan kampung. Dalam hal ini masyarakat dinilai belum memahami seberapa pentingnya mereka dalam penyusunan perencanaan pembangunan kampung sehingga dalam pelaksanaan MUSREMBANG masyarakat tidak hadir. Dari sini hal – hal yang perlu di bahas dalam MUSREMBANG tidak sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada pada tiap kampung di Kabupaten Mappi.
2. Kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan terkait pelaksanaan MUSREMBANG dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung kepada masyarakat kampung di Kabupaten Mappi. Sehingga pada saat pelaksanaan MUSREMBANG masyarakat tidak aktif dan tidak hadir dalam pelaksanaan MUSREMBANG.
3. Akses yang dilalui dari kampung menuju kabupaten sangat sulit dan tidak ada angkutan umum. Dalam hal ini jarak yang ditempuh dari kampung terdekat ke kabupaten berkisar satu jam lebih. Kemudian akses jalan yang dilalui juga tidak mendukung serta transportasi yang digunakan juga tidak memadai serta kondisi keuangan dari masyarakat masih kurang sehingga dalam menggunakan transportasi masyarakat tidak mampu karena mahal.

3.3 Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kampung Di Kabupaten Mappi

1. Menjadikan Pegawai Kontrak Daerah Sebagai Fasilitator DPMK Sumberdaya adalah faktor penting dalam mendorong konerja suatu organisasi publik. Dinas pemberdayaan masyarakat kampung sebagai lembaga teknis pemerintahan memiliki upaya untuk meningkatkan kinerja dinas dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu mengirim tenaga pegawai kontrak daerah untuk menjadi fasilitator dinas. Pegawai kontrak daerah ini bertugas memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini mengikuti MUSREMBANG, dan juga dalam pengelolaan dana desa agar sesuai peruntukkan dan tepat sasaran.

Gambar Surat Perjajian Kerja Pegawai Kontrak Daerah



Sumber: diolah peneliti 2023

2. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Aparatur DPMK. Salah satu langkah dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk meningkatkan kinerja dinas adalah dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai dan pegawai kontrak daerah guna meningkatkan kapasitas keterampilan dan kompetensi. Hal ini dilakukan dinas guna mendukung kinerja dinas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Program peningkatan kompetensi pegawai ini sudah dianggarkan pada tahun 2023 ini.

3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kampung. Hal ini dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk hadir di tengah masyarakat dan mendengar setiap keluhan atas permasalahan yang ada di masyarakat. Dinas hadir di tengah masyarakat untuk memantau pembangunan kampung dan melakukan evaluasi capaian kinerja kampung. Dinas pemberdayaan masyarakat kampung hadir untuk membantu masyarakat agar terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan kampung.

4. Meningkatkan Disiplin Pegawai DPMK. Hal ini sudah dilakukan dengan mewajibkan pegawai DPMK untuk melakukan fingerprint pada saat masuk kantor dan saat selesai bekerja. Meningkatkan disiplin pegawai sangat penting guna mendukung kinerja dinas dalam pelayanan. Hal ini perlu dilakukan karena melihat pegawai yang selama ini tidak disiplin dan harus diupayakan terus.

Melakukan Rapat Koordinasi bersama Kepala Kampung. Hal ini dilakukan DPMK untuk mengetahui progress pembangunan kampung dari kepala kampung dan kendala apa saja yang dihadapi untuk selanjutnya ditindak bersama DPMK. Kepala-kepala kampung diharapkan untuk responsive dalam menanggapi panggilan dinas apabila akan diadakan rapat kerja dan koordinasi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan tujuan dan uraian dari hasil penelitian mengenai kinerja dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung di Kabupaten Mappi dengan menggunakan empat indikator yaitu ; produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akutabilitas secara umum belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa dinas pemberdayaan masyarakat kampung Kabupaten Mappi perlu melakukan inovasi dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya baik sarana dan prasarana serta SDM dinas yang terbatas agar berdaya guna dan mendukung produktivitas dinas.

Dilihat dari segi produktivitas maupun responsivitas, masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan minimnya sumberdaya pendukung seperti fasilitas yang tidak memadai, tidak ada anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi di tiap kampung serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung. Kemudian berkaitan dengan responsibilitas, pegawai dinas sendiri didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang rendah pada tingkat SMA dan SMP sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi pegawai masih rendah. Namun dinas sudah berupaya melakukan peningkatan kapasitas pegawai dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai. Selain itu akuntabilitas dinas dapat dikatakan sudah cukup baik karena dinas telah berupaya untuk merealisasikan tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan menurunkan pegawai kontrak daerah untuk menjadi fasilitator dinas di kampung-kampung.

Selanjutnya faktor – faktor yang mempengaruhi penyusunan perencanaan pembangunan kampung dapat dilihat pada kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan kampung, tidak adanya pemberitahuan dan sosialisasi terkait penyusunan perencanaan pembangunan kampung dalam MUSREMBANG, dan kondisi akses ke kabupaten serta ongkos transportasi yang mahal jika ingin ke kabupaten.

Dinas pemberdayaan masyarakat kampung sendiri belum memiliki laporan kinerja dinas yang nantinya dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas khususnya dalam mendukung kinerja dinas dalam mendukung perencanaan pembangunan kampung. hal ini menjadi tugas dinas agar dapat mendukung kinerja dinas.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir, kinerja DPMK menurun. Khusus dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat, kinerja DPMK tidak berjalan dengan baik lantaran kekurangan anggaran dan sumberdaya pendukung. Adapun kendala yang dialami masyarakat sendiri seperti kurangnya informasi akan pelaksanaan perencanaan pembangunan kampung serta tidak didukung dengan pemahaman akan pentingnya keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan kampung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kabupaten Mappi, untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sinambela, Poltak. (2012). *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Jakarta: Cahaya Ilmu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Andi Ripai. 2013. Skripsi. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontamatene Kabupaten Kepulauan Selayar*. Universitas Hsanudin.

Hendra Mondong. 2018. Jurnal. *Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*.

Muhtardin. 2021. Skripsi. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

<https://papuaselatanpos.com/2022/07/19/buka-musrenbang-pj-bupati-mappi-usulan-program-program-harus-disesuaikan-dengan-keuangan-dan-kebutuhan-daerah/?amp>)

<https://papuaselatanpos.com/2022/07/19/buka-musrenbang-pj-bupati-mappi-usulan-program-program-harus-disesuaikan-dengan-keuangan-dan-kebutuhan-daerah/?amp>) pada tanggal 06 September 2022 pukul 22:20 WIB

